

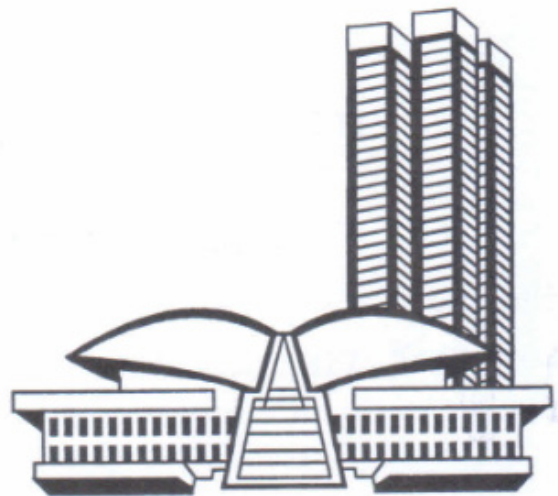
Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 22, No. 1, Maret 2017

ISSN 0853-9316

- MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPR RI
oleh: Syarifuddin dan Kemas Gerby Novario
- PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017: STRATEGI POLITIK KANDIDAT
oleh: Aryojati Ardipanto
- TEROBOSAN GLOBAL ENERGI TERBARUKAN: PEMBELAJARAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA
oleh: Hariyadi
- DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
oleh: Eka Budiyanti
- MEKANISME, JENIS PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH
oleh: Edmira Rivani
- STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA BARAT
oleh: Ari Mulianta Ginting



Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 22, No. 1, Maret 2017

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
● MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPR RI <i>oleh: Syarifuddin dan Kemas Gerby Novario</i>	1-14
● PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017: STRATEGI POLITIK KANDIDAT <i>oleh: Aryojati Ardipanto</i>	15-31
● TEROBOSAN GLOBAL ENERGI TERBARUKAN: PEMBELAJARAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA <i>oleh: Hariyadi</i>	33-44
● DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA <i>oleh: Eka Budiyanti</i>	45-57
● MEKANISME, JENIS PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH <i>oleh: Edmira Rivani</i>	59-70
● STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA BARAT <i>oleh: Ari Mulianta Ginting</i>	71-84

PENGANTAR REDAKSI

Memasuki tahun 2017, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Edisi Maret 2017. Berbagai isu yang disajikan dalam Edisi Maret ini sangat beragam, baik bidang politik maupun ekonomi. Terdapat enam tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan para penulis baik dari internal maupun penulis dari luar Pusat Penelitian.

Tulisan pertama berjudul “Mahkamah Kehormatan DPR dan Upaya Penegakkan Kode Etik DPR RI”, yang ditulis oleh Syarifuddin Syukur dan Gerby. Artikel ini mengulas tentang pentingnya Mahkamah Kehormatan DPR sebagai alat kelengkapan Dewan yang berfungsi menegakkan etika dan kehormatan Anggota DPR selama masa jabatannya.

Artikel kedua adalah tentang “Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017: Strategi Politik Kandidat”, yang ditulis oleh Aryojati dari Pusat Penelitian. Artikel ini menarik untuk dibaca dan dicermati mengingat “kemeriahan dan ketatnya pertarungan politik” antar-calon dalam proses pemilihan kepala daerah serentak 2017, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta menjadi dominan dan tidak dapat terhindarkan.

Tulisan ketiga membahas sisi ekonomi-perdagangan dengan judul “Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, yang ditulis oleh Eka Budiyaniti—peneliti ekonomi dari Pusat Penelitian. Liberalisasi perdagangan dunia adalah fenomena yang tidak bisa dielakkan oleh setiap negara termasuk Indonesia sebagai salah satu negara eksportir di dunia dengan sistem perekonomian terbuka.

Tulisan keempat ditulis oleh saudara Haryadi dengan judul “Terobosan Global Energi Terbarukan: Pembelajaran dan Implikasinya Bagi Indonesia”. Energi terbarukan merupakan kebijakan energi nasional yang harus terus direalisasikan mengingat energi fosil (*unrenewable energy*) energi semakin lama semakin menipis. Sehingga Indonesia harus terus mengembangkannya bagi kehidupan penduduk di masa datang.

Tulisan tentang “Mekanisme, Jenis Pendanaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana di Daerah” yang ditulis oleh Edmira Rivani dari Pusat Penelitian juga penting untuk dihadirkan bagi pembaca. Geografi Indonesia memang sangat rentan terhadap berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung merapi, banjir, dan lain-lain. Sistem dan mekanisme penanggulangannya serta pendanaannya merupakan aspek yang harus dikelola dengan baik agar penanganan suatu bencana (lokal dan nasional) dapat diatasi dan diminimalisir.

Tulisan yang terakhir berjudul “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat”, yang ditulis oleh Ari Mulyanta Ginting yang juga peneliti dari Pusat Penelitian. Ekonomi kreatif saat ini dan di masa mendatang menjadi salah satu penggerak ekonomi utama Indonesia. Bahkan pemerintah telah membentuk Badan Ekonomi Kreatif guna mendukung pengembangan ekonomi kreatif atau industri kreatif di masyarakat. Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung merupakan salah satu lokasi pengembangan ekonomi kreatif di Pulau Jawa yang secara terus-menerus melakukan berbagai kreasi-kreasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di Jawa Barat.

Demikianlah keenam karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian edisi bulan Maret 2017. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si, Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, Prof. Dr. Ir. I Wayan Rusastra, M.S., dan Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si, sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Maret 2017

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Syarifuddin dan Kemas Gerby Novario (Universitas Sriwijaya)

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPR RI

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, hlm. 1-14

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dulu bernama Badan Kehormatan (BK), adalah salah satu alat kelengkapan DPR RI dalam menegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD memiliki fungsi melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban anggota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Tata Tertib dan Kode Etik DPR. Beberapa kasus pelanggaran kode etik sepanjang tahun 2015 seperti terlibatnya salah satu anggota DPR RI dalam skandal Freeport, perkelahian sesama anggota dewan, dan pertemuan ketua dan wakil ketua DPR RI dalam kampanye salah satu kandidat presiden Amerika Serikat berujung pada persidangan MKD dan pemberian sanksi. Beberapa sidang MKD mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR yang belum jelas keputusannya menjadi gambaran ketegasan MKD. Tulisan ini bertujuan memberikan masukan kepada MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap untuk bertindak tegas serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya pemantauan, pencegahan, penyelidikan dan pemberian sanksi tegas dalam meminimalisir pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Artikel ini menggunakan studi literatur dan studi kasus dalam pendekatan masalah.

Kata kunci: DPR, MKD, kode etik, etika, tata tertib.

PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017: STRATEGI POLITIK KANDIDAT

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, hlm. 15-31

Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta sebagai barometer penting dalam menentukan peta politik secara nasional. Selain petahana mencalonkan diri kembali, Pasangan Calon lainnya adalah Agus-Sylvi dan Anies-Sandiaga. Dari hasil kajian dengan metodologi studi pustaka/literatur dan observasi, ditemukan bahwa strategi penonjolan prestasi-prestasi kinerja Petahana yang dapat merubah birokrasi menjadi lebih efektif dan bersih, penataan kota yang lebih tersistematis dan terstruktur, dan ketegasan dalam memberantas korupsi, serta strategi mengkritik kebijakan Petahana yang “kurang manusiawi”, sebagaimana yang dipakai oleh Pasangan Agus-Sylvi, masih kalah efektif dengan strategi isu SARA yang diandalkan oleh Pasangan Anies-Sandiaga. Realitas ini menghasilkan pembelajaran politik bagi calon-calon pemimpin politik selanjutnya, dan, di sisi lain, menyadarkan bahwa UU Pemilu perlu disempurnakan untuk dapat menyikapi konten SARA dalam kampanye, khususnya di media sosial, agar tidak membahayakan persatuan bangsa.

Kata kunci: Pilkada DKI Jakarta, Strategi Politik, petahana, SARA, UU Pemilu.

Hariyadi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

**TEROBOSAN GLOBAL ENERGI TERBARUKAN:
PEMBELAJARAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA**

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, hlm. 33-44

Upaya global dan dukungan kemauan politik nasional untuk revolusi energi terbarukan menjadi kebutuhan yang semakin signifikan di masa depan sebagai instrumen mitigasi iklim. Untuk mencapai tujuan ini, tata kelola global harus dibuat lebih demokratis, partisipatoris dan inklusif secara polisentris. Ulasan kritis terhadap tulisan “The Clean Energy Revolution: Fighting Climate Change With Innovation”, karya Sivaram & Norris (2016), menunjukkan bahwa upaya ini layak dilakukan seiring dengan tingginya tingkat konsumsi energi dunia, sementara target mitigasi iklim akan sulit tercapai, sekalipun target-target The Paris Agreement dilaksanakan. Sebagai negara dengan komitmen besar dalam pengembangan energi terbarukan dan berperan dalam mitigasi iklim, Indonesia berkepentingan terhadap diskursus upaya ini. Tantangannya terletak pada harus adanya kemauan politik pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintahan baru di AS, bagaimana pun akan mewarnai derajat legitimasi upaya ini di dalam negeri AS itu sendiri. Kondisi ini juga akan mempengaruhi tingkat legitimasinya secara nasional dan global dari upaya revolusioner ini.

Kata kunci: energi terbarukan, mitigasi iklim, Indonesia, tata kelola global, terobosan global.

DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, hlm. 45-57

Globalisasi di bidang perdagangan telah mendorong Indonesia untuk turut serta menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Muncul pendapat bahwa liberalisasi perdagangan justru akan menurunkan perekonomian. Hal ini menjadi perdebatan karena kebijakan liberalisasi perdagangan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian. Bagi Indonesia, liberalisasi perdagangan menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan perekonomian. Karena itu, menjadi penting untuk menganalisis bagaimana dampak liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan studi empiris sebelumnya, dilakukan analisis dengan menggunakan metode Error Correction Model, untuk mengetahui dampak liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian di Indonesia selama periode tahun 2005-2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel kontrol makroekonomi yang digunakan adalah investasi dan inflasi. Data yang digunakan adalah data kuartalan yang bersumber dari BPS dan World Bank. Adapun hasil uji empiris menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan secara signifikan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,05. Artinya, 1 persen kenaikan perubahan keterbukaan perdagangan menyebabkan perubahan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,05 persen. Jika dilihat dari nilainya, dampaknya memang tidak terlalu besar. Tetapi, hal ini sudah cukup membuktikan bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan Indonesia selama ini mampu mendorong perekonomian. Untuk meningkatkan dampak positif ini, pemerintah perlu melakukan reformulasi kebijakan liberalisasi perdagangan yang dapat terus meningkatkan perekonomian Indonesia.

Kata kunci: globalisasi, liberalisasi perdagangan, Indonesia, Error Correction Model, perdagangan bebas.

**MEKANISME, JENIS PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH**

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, hlm. 59-70

Indonesia menempati peringkat kedua dalam data jumlah kematian tertinggi akibat bencana alam di wilayah Asia Pasifik. Bencana yang terjadi di Indonesia membutuhkan penanganan yang baik, agar masyarakat yang tertimpa bencana mampu bangkit kembali. Dengan ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Penelitian ini mencoba meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme, jenis pendanaan, dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana di daerah serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penanggulangan bencana ditemukan beberapa masalah, yaitu kurangnya kesiapsiagaan beberapa daerah menghadapi potensi bencana, adanya bantuan yang tidak dapat dimanfaatkan korban pada tahap tanggap darurat bencana, ketergantungan daerah yang sangat besar pada BNPB, tumpang tindihnya kegiatan antar instansi pemerintah, dan beberapa permasalahan lain. Untuk mengatasi hal itu, beberapa hal harus diperhatikan, seperti perlunya penetapan definisi dan parameter yang jelas suatu kejadian dikatakan sebagai bencana. Pengategorian ini sangat penting karena akan berimplikasi pada banyak hal, seperti pendanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pengalokasian sumber daya, menghindari kesewenang-wenangan penggunaan anggaran oleh pihak-pihak terkait yang dapat berakibat pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi kegiatan penanggulangan bencana.

Kata kunci: status bencana, penanggulangan bencana, bantuan bencana, dukungan pendanaan.

STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA BARAT

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, hlm. 71-84

Negara di dunia sedang mengalami perubahan gelombang dari ekonomi berbasis pertanian pada fase awal hingga sekarang memasuki fase ekonomi kreatif. Termasuk Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi dan sumber daya ekonomi kreatif yang melimpah. Tulisan ini berdasarkan penelitian lapangan pada tahun 2016 dan memiliki tujuan untuk mengungkapkan perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjawab permasalahan di atas. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan beberapa masalah yang menjadi penghambat ekonomi kreatif, diantaranya adalah aspek keuangan dan permodalan, aspek Sumber Daya Manusia (SDM), aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Aspek pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan langkah konkrit dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, di antaranya dengan mencari alternatif pembiayaan bagi ekonomi kreatif, mengembangkan konsep quatro helix model bagi pengembangan ekonomi kreatif, melakukan pemasaran dengan penekanan local brand dan melalui media sosial, serta bagian terpenting bagi pengembangan ekonomi kreatif adalah aspek HAKI. Kombinasi langkah tersebut, jika dijalankan dengan baik, dapat meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci: ekonomi kreatif, strategi pengembangan, SDM, HAKI, pemasaran, Jawa Barat.

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Syarifuddin dan Kemas Gerby Novario (Universitas Sriwijaya)

DPR HONORARY COUNCIL AND THE ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, pp. 1-14

DPR Honorary Council (MKD) formerly known the Honorary Board (BK) is one of parliament's complimentary organ in upholding the honor and dignity of Members of Parliament (MPs) as people's epresentative. MKD plays its function in monitoring the behavior of MPs as regulated in the Rules of Conduct and Code of Ethics. Some cases of violations in 2015 are the involvement of a MPs in Freeport scandals, brawling and showing bad manner in meeting chairman, and getting involve in the campaign of US presidential candidates led to the MKD trials and sanctions. Some hearings of MPs violations has demonstrated MKD's failure in making firm sanctions. This article aims to provide inputs to MKD to be able to act decisively with other parties in monitoring, investigating and putting sanctions to minimize code violations. This article uses mix approaches of library and cases studies.

Keywords: DPR, MKD, ethic code, ethics, Rules of Procedures.

THE ELECTION OF GOVERNOR OF DKI JAKARTA 2017: CANDIDATE POLITICS STRATEGY

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, pp. 15-31

The Election of Jakarta Governor is an important barometer for national politics in the country. The Incumbent (Ahok-Djarot) was again become one of the candidates, together with Agus-Sylvi and Anies Sandiaga. Based on this research, using library studies and observations, it was found that the strategy of the Incumbent by socializing their successes, i.e in making bureaucracy more effective and clean, is easily defeated by religious and racial issues used by its main rival, Anies-Sandiaga. The writer underlines that this political reality, spreading religious and racial issues using social media, should be avoided by Indonesia's future leaders, taking into account that country's unity can be sacrificed. The author recommends, therefore, the need to amend the Election Law to prevent the country from disunifying because of the sectarian conflict created by the local election.

Keywords: Pilkada, local election, DKI Jakarta, candidates' strategy, SARA, Election Law.

**A GLOBAL RENEWABLE ENERGY BREAKTHROUGH:
LESSON LEARNED AND ITS IMPLICATION TO INDONESIA**

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, pp. 33-44

A global effort and national political-will supports towards a revolutionary renewable energy development will be a significant instrument to mitigate the climate change in the future. To achieve this goal, a global governance order shall be undertaken more democratically, participatory and inclusively. A critical review towards Sivaram & Norris' article (2016), namely "The Clean Energy Revolution: Fighting Climate Change With Innovation", argues such an important effort as global energy consumption is rising significantly while the climate mitigation target is likely difficult to achieve although all the Paris Agreement is met. As a country with a strong commitment to develop renewable energy and to commit politically to take part in the global mitigation efforts, Indonesia is likely concerned with this discourse. The challenge remains high particularly in term of the political will. The likely changing of the US new administration policy may affect the legitimacy of this discourse in the domestic sphere, a situation that may affect its legitimacy globally.

Keywords: renewable energy, climate mitigation, Indonesia, global governance, global breakthrough.

THE IMPACT OF TRADE LIBERALISATION ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, pp. 45-57

Trade globalization has encouraged Indonesia to participate and to implement trade liberalization policies. The argument appeared is trade liberalization will reduce the economy -- a debate for trade liberalization policies because the policies created to improve the efficiency of economy. For Indonesia, the trade liberalization becomes a challenge and an opportunity to boost the economy. It becomes important, therefore, to analyse how the impact of trade liberalization on the Indonesian economy. The analysis is based on previous empirical studies and using Error Correction Model to determine the impact of trade liberalization on the Indonesia economy during the period 2005-2015. As for the macroeconomic control variables used are investment and inflation. The quarterly data sourced from BPS and World Bank. The empirical test results show that trade liberalization has significantly positive impact on Indonesia economic growth amounted to 0.05. The impact value is not too large, but this is enough to prove that the trading activities have been able to stimulate the economy. To increase this positive impact, the government needs to reformulate trade liberalization policies that can continue to improve country's economy.

Keywords: globalization, trade liberalization, Indonesia, Error Correction Model, free trade.

**MECHANISM, TYPE OF FUNDING, AND
ACCOUNTABILITY OF DISASTER MANAGEMENT FUNDS IN REGION**

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, pp. 59-70

Indonesia ranks at second place in the number of highest death due to natural disaster in the Asia Pasific region. Many disaster that have happened in Indonesia require good handling, thus, the affected community was able to rise again. With the enactment of the law number 24 of 2007 on Disaster Management, the implementation of disaster management is expected to become better, because both of the central and regional governments have the responsibility in the implementation of disaster management. Disaster management is conducted from stage of pre disaster, emergency response, and post disaster. A good disaster management must be supported by well budgeting, disbursement and use of fund, transparent and accountable, both coming from the budget of the central and regional governments and the community. This research describes the mechanisms, types of funding, and accountability of disaster management funds in region and identifies the problems in handling disasters. It uses a qualitative approach in answering the purposes above. There are some problems in disaster management that can be found, such as lack of readiness in some regions facing a potential disaster, disaster aid that cannot be used at the emergency response stage, highly dependency of regions on BNPB, overlapping activities among government agencies, and some other issues. In overcoming these problems, we must notice the need for determination of clear definition and parameter of disaster. The categorization is very important because it will have implications on many things, such as disaster funding support and the allocation of resources, as well as avoid misuse of the budget by related parties which can result in low transparency and accountability of disaster management activities.

Keywords: disaster status, disaster management, disaster related aid, funding support.

THE DEVELOPMENT STRATEGY OF CREATIVE ECONOMIC IN THE WEST JAVA PROVINCE

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, pp. 71-84

Changes in the agriculture-based economy are occurring and most countries are entering a new phase of creative economic. West Java is one of the provinces in Indonesia that has plenty potentials and sources of creative economic. This article based on research conducted in 2016, aiming to examine the development of the creative economy in the West Java province, revealing problems and challenges faced. This study applied a qualitative method using descriptive explanations to answer the problems. Its findings reveal several obstacle factors in financial and capital, human resources, copy rights, and marketing. In response with those problems, the local and central governments make some strategies, i.e. finding alternative financing, developing the concept quatro helix model, improving marketing by inventing local brands and through social media, as well as protecting their intellectual property rights. With all those strategies, the creative economic can expectedly increase and boost West Java economy.

Keywords: creative economic, development strategy, human resources, intellectual property rights, marketing, West Java.